

TESIS

**DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

***DETERMINANTS OF THE QUALITY OF REGIONAL
GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS WITH
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS A MODERATING
VARIABLE***

RISAL



**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

***DETERMINANTS OF THE QUALITY OF REGIONAL
GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS WITH
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS A MODERATING
VARIABLE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**RISAL
A042221011**



kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Disusun dan diajukan oleh

RISAL
A042221011

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal 15 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA
NIP 196511271991032001

Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA
NIP 196604051992032003

Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si
NIP 197209212006042001



REKTORAT UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Risal
Nim : A042221011
Jurusa/Program Studi : Magister Keuangan Daerah

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dn pasal 70).

Makassar, 17 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Risal

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA beserta Ibu Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Madris, DPS., SE., M.Si. Ibu Dr. Sri Sundari, SE., Ak., M.Si., CA dan Ibu Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan arahan, masukan dan kritik yang berharga kepada peneliti.
4. Bapak Dr. Adnan Purictha Ichsan, SH., MH selaku Bupati Kabupaten Gowa atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di semua OPD lingkup wilayah Kabupaten Gowa.
5. Pimpinan OPD Wilayah Kabupaten Gowa, kemudian Kasub bagian keuangan, akuntansi dan bendahara yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini.
6. Semua sahabat seperjuangan pada Magister Keuangan Daerah dan semua teman yang terlibat dalam mendukung dan memotivasi peneliti.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu beserta saudara peneliti atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik. Tesis ini masih jauh dari

sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 17 Juli 2024
Peneliti

Risal

ABSTRAK

RISAL. *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi* (dibimbing oleh Nirwana dan Andi Kusumawati).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik secara langsung maupun dimoderasi oleh komitmen organisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei pada 36 organisasi perangkat daerah dengan menggunakan kuesioner. Sampel sebanyak 63 responden. Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan (2) komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah



ABSTRACT

RISAL. *Determinants of Quality of Regional Government Financial Reports with Organizational Commitment as a Moderating Variable* (supervised by Nirwana and Andi Kusumawati)

This research aims at examining and describing the influence of the government accounting standards, internal control systems, use of information technology and human resources competency on the quality of the regional government financial reports, either directly or moderated by the organizational commitment. Data analysis used the quantitative method. The data collection was carried out by using the survey technique on 36 regional organizations using the questionnaires with the sample size of 63 respondents. The research results indicate that: (1) the government accounting standards, internal control system, and human resources competency have the positive and significant effect on the quality of the regional government financial reports. Whereas, the use of information technology does not have any influence on the quality of the regional government financial reports, (2) the organizational commitment is unable to moderate the influence of the government accounting standards, internal control systems, utilization of information technology and human resources competency on the quality of the regional government financial reports.

Key words: government accounting standard, internal control system, use of information technology, human resource competency, quality of regional government financial report



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN | iv |
| PRAKATA..... | v |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian | 9 |
| 1.5. Ruang Lingkup Penelitian | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1. Tinjauan Teori dan Konsep | 10 |
| 2.1.1. <i>Agency Theory</i> dan <i>Theory Stewardship</i> | 10 |
| 2.1.2. Penerapan SAP | 11 |
| 2.1.3. Sistem Pengendalian Internal | 14 |
| 2.1.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi | 15 |
| 2.1.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia | 16 |
| 2.1.6. Komitmen Organisasi | 17 |
| 2.1.7. Kualitas Laporan Keuangan | 19 |
| 2.2. Tinjauan Empiris | 21 |
| | |
| BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS | 25 |
| 3.1. Kerangka Konseptual | 25 |
| 3.2. Hipotesis..... | 25 |
| | |
| BAB IV METODE PENELITIAN..... | 33 |
| 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian | 33 |
| 4.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Data | 33 |
| 4.3. Jenis dan Sumber data | 35 |
| 4.3.1. Jenis Data..... | 35 |
| 4.3.2. Sumber Data..... | 35 |
| 4.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional | 35 |
| 4.4.1. Variabel Depeden (<i>Dependent Variable</i>) | 35 |
| 4.4.2. Variabel Independen (<i>Independent Variable</i>)..... | 35 |
| 4.4.3. Variabel <i>Moderating</i> | 36 |
| 4.5. Uji Instrumen Penelitian | 37 |
| 4.5.1. Uji Validitas | 38 |
| 4.5.2. Uji Reabilitas | 38 |
| 4.6. Uji Asumsi Klasik..... | 38 |

| | |
|--|----|
| 4.6.1. Uji Normalitas..... | 39 |
| 4.6.2. Uji Multikolonieritas..... | 39 |
| 4.6.3. Uji Heteroskedastisitas | 40 |
| 4.7. Teknik Analisis Data | 40 |
| 4.7.1. Analisis Deskriptif | 41 |
| 4.7.2. Analisis Inferensial | 41 |
| 4.8. Uji Hipotesis..... | 42 |
| 4.8.1. Uji Simultan (Uji F) | 42 |
| 4.8.2. <i>Moderated Regresion Analylsis</i> (MRA)..... | 42 |
| 4.8.3. Uji Parsial (Uji T) | 43 |
| BAB V | |
| HASIL PENELITIAN | 44 |
| 5.1. Penyajian Hasil Penelitian | 44 |
| 5.1.1. Deskripsi Data..... | 44 |
| 5.1.2. Deskripsi Hasil Penelitian | 46 |
| 5.2. Hasil Uji Instrumen Penelitian | 49 |
| 5.2.1. Uji Validitas | 49 |
| 5.2.2. Uji Reliabilitas | 50 |
| 5.3. Hasil Uji Asumsi Klasik | 51 |
| 5.3.1. Uji Normalitas..... | 51 |
| 5.3.2. Uji Multikolonieritas..... | 52 |
| 5.3.3. Uji Heteroskedastisitas | 53 |
| 5.4. Hasil Uji Hipotesis | 54 |
| 5.4.1. Uji Simultan (Uji F) | 54 |
| 5.4.2. Uji Parsial (Uji T) | 55 |
| 5.4.3. Uji Moderated Regresion Analysis (MRA)..... | 58 |
| BAB VI | |
| PEMBAHASAN | 61 |
| 6.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan..... | 61 |
| 6.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan..... | 61 |
| 6.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan..... | 62 |
| 6.4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan..... | 63 |
| 6.5. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi | 64 |
| 6.6. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi | 65 |
| 6.7. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi | 66 |
| 6.8. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi | 67 |

| | |
|-------------------------|----|
| BAB VII PENUTUP..... | 68 |
| 7.1. Kesimpulan..... | 68 |
| 7.2. Implikasi | 70 |
| 7.3. Keterbatasan | 71 |
| 7.4. Saran..... | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|--------------|--|----------------|
| 4.1 | Pengukuran <i>Skala Likert</i> | 34 |
| 4.2 | Indikator Variabel Penelitian | 37 |
| 5.1 | Distribusi Responden | 45 |
| 5.2 | Karakteristik Responden | 45 |
| 5.3 | Statistik Deskriptif Variabel Penelitian | 47 |
| 5.4 | Uji Validitas..... | 49 |
| 5.5 | Uji Reliabilitas | 50 |
| 5.6 | Uji Normalitas | 51 |
| 5.7 | Uji Multikolonieritas | 52 |
| 5.9 | Hasil Uji Statistik (F-test) | 54 |
| 5.10 | Hasil Uji Hipotesis | 55 |
| 5. 11 | Hasil Uji Hipotesis Analisis MRA | 58 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | | Halaman |
|---------------|---|----------------|
| 3.1 | Model Empiris Kerangka Konseptual | 25 |
| 5.1 | Uji Heteroskedastisitas | 53 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | | Halaman |
|----------|--|---------|
| 1 | Kuesioner Penelitian | 78 |
| 2 | Izin Penelitian PTSP SULSEL..... | 85 |
| 3 | Izin Penelitian PTSP Kabupaten Gowa..... | 86 |
| 4 | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | 87 |
| 5 | Akumulasi Jawaban Responden | 89 |
| 6 | Statistik Deskriptif..... | 95 |
| 7 | Uji Validitas..... | 96 |
| 8 | Uji Reabilitas..... | 102 |
| 9 | Uji Asumsi Klasik..... | 108 |
| 10 | Uji Hipotesis..... | 112 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), merupakan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap tuntutan publik atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi pemakainya. Informasi yang berkualitas ialah informasi yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (Faturey dkk, 2021).

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan yang baik akan mencerminkan tertib pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu kualitas LKPD sangat penting karena dapat memberikan dampak positif, bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan juga menentukan kebijakan pemerintahan di masa mendatang. Selain itu kualitas LKPD dapat memberikan dampak kepada peningkatan percepatan pembangunan serta penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi seperti kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia. Kualitas LKPD yang baik dapat dilihat melalui perolehan opini dari hasil audit BPK, opini audit merupakan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh BPK berdasarkan kewajaran informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan berdasarkan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Gowa merupakan kabupaten yang tercatat telah 11 kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga tahun 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Gowa disusun berdasarkan 4 kriteria BPK dalam memberikan opini atas LKPD Kabupaten/Kota. Kriteria yang dimaksud adalah kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Keberhasilan mencapai opini WTP yang ke 11 kalinya diakui merupakan buah dari komitmen bersama yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Gowa. Namun tak bisa dipungkiri masih terdapat beberapa perbaikan penyajian dan ini masih butuh upaya berkelanjutan secara sistematis serta konsisten dalam menyajikan laporan keuangan. Seperti halnya pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Gowa memperoleh opini WDP dari BPK dikarenakan BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Belanja Tak Terduga saat covid 19 (BPK RI, 2021).

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan 7.5.1.2.a2 atas laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Gowa menyajikan saldo belanja barang dan jasa sebesar Rp. 411,69 milyar. Nilai tersebut termasuk untuk kegiatan pengadaan bahan pokok dalam rangka pelaksanaan program jarring pengaman sosial sebesar Rp. 14,1 milyar. Proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan penunjukan langsung dalam rangka penanganan Covid 19. Proses penunjukan langsung dilaksanakan tanpa adanya Riwayat pekerjaan sejenis sebelumnya yang cukup dan tepat untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai belanja barang dan jasa dimaksud.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 7.5.1.2.b.5 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Gowa menyajikan saldo Belanja Modal Aset

Tetap Lainnya sebesar Rp14,88 milyar. Nilai tersebut termasuk untuk kegiatan penyusunan, pengadaan dan pendistribusian buku modul SKTB sebesar Rp 6,5 milyar. Proses penyusunan buku modul SKTB tidak memperoleh izin kepala daerah dan buku modu I SKTB yang dicetak tidak memenuhi standar grafika buku tematik serta materi dalam buku modul SKTB belum didaftarkan untuk mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proses pengadaan dan distribusi buku modul SKTB tidak sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS reguler TA 2020 dengan adanya kewajiban pembelian buku modul SKTB oleh satuan pendidikan dasar. Dari nilai tersebut, berdasarkan harga eceran tertinggi, terdapat selisih harga minimal sebesar Rp 3,8 milyar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai pengadaan yang sebenarnya untuk memperoleh keyakinan atas nilai belanja modal tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 7.5.1.2.c atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Gowa menyajikan saldo Belanja Tak Terduga sebesar Rp 35,45 milyar. Nilai tersebut termasuk untuk kegiatan pengadaan bahan pokok dalam rangka penanganan keadaan darurat selama masa pandemi Covid-19 sebesar Rp 21,07 milyar. Proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan penunjukan langsung dalam rangka penanganan Covid-19. Proses penunjukan langsung dilaksanakan tanpa adanya riwayat pekerjaan sejenis sebelumnya dan tidak ada revidi kewajaran harga. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Belanja Tak Terduga dimaksud.

BPK menerangkan, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut

di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Faktor yang ditemukan dari penelitian tersebut masih terdapat kesenjangan yang masih perlu dikaji lebih mendalam. Faktor-faktor tersebut diantaranya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Komitmen Organisasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar ini syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Faturey dkk. (2021); Ternalemta dkk. (2021); Sutisman dkk. (2021); Hasanah dan Siregar (2021); Sutisman dkk. (2020); (Rohmah dkk. (2020); Philadelphia dkk. (2020); Ayu dan Kusumawati (2020); Ikriyati dan Aprila (2019); Ardianto dan Eforis (2019). Sedangkan Apriansyah dkk. (2020); Dewi dan Hoesada (2020); Aswar (2020) menyatakan penerapan SAP tidak berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). Menurut Rahmawati dkk. (2018), pengendalian

internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar informasi pelaporan keuangan reliabel. Penelitian yang dilakukan oleh Faturey dkk. (2021); Ternalemta dkk. (2021); Atiningsih (2020); Rohmah dkk. (2020); Ayu dan Kusumawati (2020); Lestari dan Dewi (2020); Saputra dkk. (2020); Ikriyati dan Aprila (2019); Rahmawati dkk. (2018), menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian dari Hasanah dan Siregar (2021); Philadelphiah dkk. (2020); Ardianto dan Eforis (2019).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan (Rahmawati dkk., 2018). Laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai melalui pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Penelitian dari Ternalemta dkk. (2021); Dewi dan Hoesada (2020); Atiningsih (2020); dan Rahmawati dkk. (2018) menyatakan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun bertentangan dengan penelitian dari Apriansyah dkk. (2020).

Selain faktor diatas Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) juga mempengaruhi kualitas LKPD. SDM merupakan pilar utama dalam sebuah organisasi atau instansi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, oleh karena itu sebaik apapun sistem dalam organisasi tersebut akan sia-sia jika tidak didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten terutama pada personal sumber daya manusia dalam Pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Kompetensi SDM pada penelitian Modo dkk (2016) dan Armel dkk (2017). memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan pada penelitian lainnya yaitu Wijayanti (2017) dan Zulkarnain dan Ningrum (2020) menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Faktor terakhir adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi mempunyai pengertian sebagai sesuatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan kata lain komitmen organisasi menyiratkan hubungan individu dengan perusahaan atau organisasi secara aktif. Karena individu yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyongkong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja. Penelitian terdahulu yang menyatakan Komitmen Organisasi memoderasi semu (Quasi Moderator), dan Komitmen Organisasi memoderasi murni (Pure Moderator). Komitmen organisasi mampu memoderasi beberapa variable yang memengaruhi kualitas laporan keuangan sebagaimana terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutisman dkk. (2021); Saputra dkk. (2020); dan Sanjaya dkk. (2017).

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, yaitu: Pasolo dkk (2020), Faturey dkk (2021), Afrina

dkk (2021), dan Bestari & Wahyuni (2023). Penelitian ini memperluas objek penelitian sebagaimana saran dari peneliti sebelumnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian di bidang akuntansi khususnya penyajian kualitas laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai “Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan-permasalahan utama yang akan diungkapkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan?
7. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan?

8. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Untuk menguji dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
6. Untuk menguji dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
7. Untuk menguji dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
8. Untuk menguji dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka informasi yang didapatkan dari penelitian ini memiliki kegunaan penelitian yaitu:

1. Kegunaan Teoritis (Keilmuan)
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/sumbangsi masukan pada pengembangan teori tentang akuntansi.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan judul penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis (Operasional)
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan/referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya terkait pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi-instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang membacanya guna memberikan pandangan dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa pada 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengambil variabel penelitian diantaranya: 1). Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai Variabel Depeden. 2). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan tekhnologi, Kompetensi Sumber daya manusia (SDM) dan Komitmen organisasi sebagai Variabel Independen, dan 3). Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. *Agency Theory* dan *Theory Stewardship*

Agency theory menunjukkan adanya kepentingan hubungan antara agen dan principal. *Agency theory* dapat diaplikasikan dalam organisasi sektor publik dan demokrasi modern. Pada dasarnya organisasi publik dibangun di atas konsep *agency theory* dimana pemerintah berperan sebagai agen dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada para pengguna laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh karenanya dibutuhkan sistem akuntansi yang baik (Pasolo dkk, 2020).

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* adalah teori yang mendeskripsikan suatu kondisi manajer atau pemimpin tidak berfokus pada tujuan pribadi, melainkan lebih berorientasi pada tujuan utamanya yaitu kepentingan suatu instansi atau lembaga. Teori ini menganggap bahwa terdapat korelasi yang kuat antara kesuksesan instansi/lembaga dengan kepuasan pemilik. Upaya untuk memperoleh kesuksesan pada sebuah instansi atau lembaga adalah dengan memaksimalkan utilitas kelompok *participal* dan manajemen, sehingga kepentingan individu dalam organisasi tersebut dapat dimaksimalkan. Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kesuksesan sebuah organisasi dengan kepuasan *principal*. Teori ini mendasari konsep yang digunakan Organisasi sektor publik, aparat pemerintah

bertindak sebagai steward yang akan melayani masyarakat sebagai pemilik (*principal*), karena dalam sistem pemerintahan di Indonesia warga atau masyarakat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat, oleh karena itu laporan keuangan harus disusun dengan kualitas yang baik dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Bestari & Wahyuni,2023).

2.1.2. Penerapan SAP

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah. “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia”. Dengan mengacu pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dibandingkan dan berguna untuk penilaian kinerja pemerintah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAP (Faturey dkk, 2021).

Standar tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Secara umum, SAP

berbentuk Pernyataan yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu, SAP memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan. Prinsip-prinsip dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam (Mentu & Sondakh, 2016) mengemukakan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Basis Akuntansi

Pada prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan agar basis akuntansi disajikan bersama laporan keuangan dengan basis kas. Basis akrual untuk laporan operasional sebagai petunjuk bagi pendapatan yang diakui ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi dengan mudah.

3. Realisasi (*Realization*)

Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan

melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun mengurangi kas.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance over Form*)

Prinsip ini sebagai Informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Jika substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dikehendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Keadaan tersebut bukan berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, namun metode akuntansi yang dipakai dapat diganti dengan syarat. Adapun syarat tersebut adalah metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu pengungkapan informasi harus dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat tersebut dapat mengandung unsur kehati-hatian sehingga dalam laporan keuangan aset tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.1.3. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No 60 Tahun 2008).

SPI merupakan mekanisme keseluruhan dari aksi dan aktivitas yang dilaksanakan secara kontinu oleh manajemen dalam meyakinkan terciptanya tujuan organisasi lewat aktivitas yang efektif dan efisien, keunggulan laporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan (Mirnawati, dkk 2021). SPI terdiri dari format organisasi, prosedur, dan bentuk-

bentuk yang diatur dalam menjaga kekayaan organisasi, memastikan akurasi dan kualitas data akuntansi, meningkatkan efisiensi serta menstimulasi ketaatan atas kebijakan manajemen. SPI menjelaskan tentang lima komponen atau unsur yang harus diterapkan dalam kegiatan roda pemerintahan (Mirnawati dkk, 2021) yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2.1.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk

menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi berarti memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data untuk mempermudah kerja pegawai.

Pemanfaatan teknologi informasi menurut (Afrina dkk, 2021) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Sistem tanggapan yang disediakan oleh organisasi terkadang kurang mendapat perhatian dari para karyawan untuk lebih menumbuhkan sikap loyal terhadap karyawan, hal ini disebabkan adanya rasa khawatir dari para karyawan akan mendapatkan sanksi bila menyampaikan keluhannya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi harus didukung oleh komitmen organisasi pegawainya agar dapat menghasilkan kinerja maksimal.

2.1.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan aspek penting yang berpengaruh pada kinerja karyawan atau pegawai di suatu lembaga. Pegawai di suatu lembaga harus mempunyai kompetensi yang memadai, keahlian khusus, serta perilaku yang baik dalam menjalankan tugasnya. Dengan spesifikasi yang dimilikinya tersebut maka akan meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga lebih efektif dan efisien. (Bestari & Wahyuni, 2023)

Dalam pembuatan LKPD, diperlukan SDM yang memiliki sebuah kompetensi dalam bidang akuntansi. Dengan adanya SDM yang memiliki kompetensi serta latar belakang Pendidikan akuntansi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta tujuan organisasi dapat tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah

daerah. Sejalan dengan penelitian Armel dkk (2017) dan Mahardini dan Miranti (2018) juga menunjukkan hasil adanya pengaruh yang positif signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada teori stewardship dapat diasumsikan bahwa eksistensi pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh publik mampu menjalankan tugas serta fungsinya dengan tepat. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya maka membutuhkan SDM yang berkompeten dalam membuat informasi yang berkualitas pada laporan keuangan. SDM yang berkompeten yang didukung dengan latar Pendidikan yang memadai, serta berpengalaman di bidang keuangan. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sumber daya manusia yang berkompetensi baik yaitu yang memiliki sikap, pengetahuan, dan skill, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bebas dari kesalahan.

2.1.6. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi. Istilah lain dari komitmen organisasi adalah komitmen kerja atau dimensi perilaku yang dapat digunakan untuk menilai atau mengukur kecenderungan pegawai (Putu dan I Wayan, (2017). Komitmen kerja merupakan suatu keadaan seorang karyawan yang memihak organisasi tertentu, serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Robbins dan Judge, 2014).

Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan memperkuat komitmen kerja dari karyawan dalam mencapai tujuan organisasi, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Pane, 2017) Mereka menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Karakteristik personal, seperti usia, masa kerja, motivasi berprestasi yang mempunyai hubungan positif dengan komitmen kerja. Didapatkan pula adanya pengaruh ras, jenis kelamin, dan kepuasan kerja. Sementara tingkat pendidikan mempunyai hubungan negatif dengan komitmen kerja.
2. Karakteristik kerja, seperti stress mempunyai hubungan negatif dengan komitmen kerja dan pemerdayaan pekerjaan, kejelasan tugas, kesesuaian peran, tantangan pekerjaan, kesempatan berinteraksi dengan orang lain dan umpan balik yang berhubungan dengan komitmen kerja.
3. Karakteristik struktural, Komitmen kerja berkorelasi positif dengan tingkat formalisasi, ketergantungan profesional, desentralisasi dan tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan, jumlah andil yang ditanam karyawan dan fungsi control dari perusahaan.
4. Pengalaman kerja, antara lain: tingkat sejauh mana karyawan merasakan sejumlah sikap positif terhadap perusahaan, tingkat kepercayaan karyawan terhadap perusahaan bahwa perusahaan akan memeliharanya, merasakan adanya kepentingan pribadi antara diri karyawan dengan perusahaan dan sejauh mana harapan-harapan karyawan dapat terpenuhi melalui pekerjaannya.

Pane, (2017) merumuskan komponen-komponen komitmen yang mempengaruhi komitmen organisasi sehingga karyawan memilih tetap atau meninggalkan organisasi berdasarkan norma yang dimilikinya. Tiga komponen tersebut adalah:

- a. *Affective commitment*, berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi karena keinginannya sendiri. Kunci dari komitmen ini adalah want to. Dalam tipe komitmen ini, individu merasa adanya kesesuaian antara nilai pribadinya dan nilai organisasi.

- b. *Continuance commitment*, merupakan suatu komitmen yang didasarkan pada kebutuhan rasional. Dengan kata lain komitmen ini terbentuk atas dasar untung rugi, dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan menetap pada organisasi. Kunci dari komitmen tipe ini lebih mendasarkan keterikatannya pada *cost benefits analysis*.
- c. *Normative commitment*, adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang ada dalam diri individu, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Individu merasa harus bertahan karena loyalitas. Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi (*ought to*). Tipe komitmen ini dikarenakan nilai-nilai moral yang dimiliki individu secara pribadi.

2.1.7. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2015) laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Pada kesimpulannya pengertian laporan keuangan merupakan dokumen yang memberikan informasi pencatatan dari segala transaksi yang berkaitan dengan uang, pembelian dan penjualan serta kredit. Laporan keuangan juga berfungsi untuk mengetahui keadaan finansial suatu

perusahaan, sehingga laporan keuangan yang dibuat dapat secara detail, tepat dan dengan perhitungan yang baik (PSAK No. 1 (2015:2)).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:3) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan serta kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Said dan Noch, 2018). Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip. Laporan keuangan menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan

fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi tersebut berguna oleh para penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan kualitas informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.2. Tinjauan Empiris

Futurey dkk (2021) metode Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Aru. Sampel penelitian adalah kepala dan staf sub bagian keuangan pada 40 Organisasi Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAP Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ternalemta dkk. (2021); Sutisman dkk. (2021); Hasanah dan Siregar (2021); Sutisman dkk. (2020); (Rohmah dkk. (2020); Philadelphia dkk. (2020); Ayu dan Kusumawati (2020); Ikriyati dan Aprila (2019); Ardianto dan Eforis (2019). Sedangkan Apriansyah dkk. (2020); Dewi dan Hoesada (2020); Aswar (2020) menyatakan penerapan SAP tidak berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan.

Bestari & Wahyuni (2023) metode penelitian yang berjudul “Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tegal. Sedangkan Subjek dari penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di OPD yang memiliki hubungan secara langsung pada bidang pengelolaan keuangan di masing-

masing OPD. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam metode pengambilan sampel dengan pertimbangan memilih sampel supaya dapat memberikan data yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, penelitian yang dilakukan oleh Faturey dkk. (2021); Ternalemta dkk. (2021); Atiningsih (2020); Rohmah dkk. (2020); Ayu dan Kusumawati (2020); Lestari dan Dewi (2020); Saputra dkk. (2020); Ikriyati dan Aprila (2019); Rahmawati dkk. (2018), menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian dari Hasanah dan Siregar (2021); Philadelphia dkk. (2020); Ardianto dan Eforis (2019).

Armel (2017) metode penelitian yang berjudul “Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)”. Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan teori *stewardship* bahwa pemerintah adalah sebagai *steward* yang bertanggung jawab memberikan pelayanan publik yang transparan dan optimal dalam hal ini berupa pengolahan data transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Ternalemta dkk. (2021); Dewi dan Hoesada (2020); Atiningsih (2020); dan Rahmawati dkk. (2018) menyatakan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan. Namun bertentangan dengan penelitian dari Apriansyah dkk. (2020).

Ayu & Kusumawati (2020) metode penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah” Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Modo dkk (2016) dan Armel dkk (2017). Memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan pada penelitian lainnya yaitu Wijayanti (2017) dan Zulkarnain dan Ningrum (2020) menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Pasolo, (2023) metode penelitian yang berjudul Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jayapura dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Jayapura dengan kriteria yang diambil yaitu ka.sub bagian keuangan dan bidang perencanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi dapat Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jika penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memuat prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah maka laporan keuangan daerah akan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sutisman dkk (2021) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi dapat

Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Alminanda & Marfuah (2018) metode Penelitian yang berjudul “Peran Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul. Sampel penelitian adalah kepala sub.bag. keuangan, akuntansi dan bendahara pada 32 Organisasi Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi merupakan faktor yang memiliki peranan penting.